



Analisis Model Idiosinkratik Presiden Rodrigo Roa Duterte Atas Kebijakan *War on Drugs* di Filipina

Ni Made Mia Krisna Santi¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, Anak Agung Ayu Intan Parameswari³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Presiden Rodrigo Roa Duterte dalam membuat kebijakan *war on drugs* yang dianalisis melalui aspek idiosinkratik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif, dengan kerangka pemikiran teori idiosinkratik, pendekatan psikobiografi dan model analisis idiosinkratik dalam membuat kebijakan. Penelitian ini memperoleh jawaban bahwa ambisi Duterte untuk memberikan perlindungan bagi generasi penerusnya didukung oleh kesuksesan pengalamannya menjadi Walikota Davao. Tekad Duterte yang direpresentasikan melalui janjinya untuk memberantas narkoba, membuatnya berfokus pada tugas untuk dapat menyelesaikan permasalahan narkoba dalam waktu yang terhitung cepat, yaitu 3-6 bulan dengan cara yang praktis, yakni membunuh (menembak mati) para kriminal narkoba, membuatnya termasuk ke dalam kategori pemimpin yang mengadopsi gaya kepemimpinan dan tipe pemimpin yang *Task Oriented* dan *Pragmatic Directive*.

Kata-kunci : Filipina, Idiosinkratik, Kepribadian Pemimpin, Presiden Duterte, *War on Drugs*.

Abstract

This research aims to explain the reasons for President Rodrigo Roa Duterte in assigning a war on drugs policy which is examined through idiosyncratic aspects. This research utilized an explanatory qualitative method, with an idiosyncratic theoretical framework, a psychobiographical approach, and an idiosyncratic analysis model in policy making. This research discovers Duterte's ambitions to protect forthcoming generations is supported by his prosperous experience as Mayor of Davao. Duterte's determination, which is represented by his vow to eradicate drugs, obliged his emphasis on the task of being eligible to solve drug problems in a relatively fast period of 3-6 months in a fairly practical way, namely killing (shooting dead) drug criminals. Duterte becomes a leader who adopts leadership styles and types of leaders who are Task Oriented and Pragmatic Directive.

Keywords : *Idiosyncratic, Leader Personality, Philippines, President Duterte, War on Drugs.*

Kontak Penulis

Ni Made Mia Krisna Santi
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali
Telp: +62 361 255378 Fax: +62 361 255916
E-mail:miakrisnasanti8@gmail.com

PENDAHULUAN

Mintz & DeRouen (2010), dalam bukunya menyebutkan terdapat beberapa unsur yang berpengaruh pada proses pembuatan suatu keputusan oleh aktor negara yakni unsur internasional, domestik, lingkungan dan psikologis. Sehingga penting untuk mengetahui unsur idiosinkratik yang dapat memengaruhi motivasi dari aktor negara dalam membuat kebijakan di negaranya. Rodrigo Roa Duterte merupakan Presiden Filipina ke-16 yang dilantik pada tanggal 30 Juni 2016. Dalam tulisan Bahaduri (2017), pemerintahan Duterte akan memberikan prioritas pencapaian pada tiga pilar pembangunan yang dijelaskan oleh James Edgar Chow (2016:9) yang salah satunya yaitu pilar keamanan yang didalamnya termuat *war on terror*, *war on corrupt* dan *war on drugs*. Secara khusus Duterte memprioritaskan bidang keamanan pada *war on drugs* yang dilatar belakangi oleh Filipina sebagai negara yang memiliki permasalahan narkoba yang tinggi.

Pada tahun 2016, sebanyak empat (4) juta masyarakat Filipina berstatus sebagai pengguna narkoba (DDB, 2019). Duterte melihat perdagangan dan kecanduan terhadap narkoba menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi Filipina. Ia berjanji untuk memberantas narkoba melalui kebijakan *war on drugs* (Michelle, 2016). Sejatinya kebijakan ini merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya yang pernah ia terapkan dalam karir politiknya sebagai Walikota Davao. Langkah Duterte dalam memberantas narkoba mendapat sambutan baik dari masyarakat Filipina yang menunjukkan persentase persetujuan terhadap Duterte sebesar 86% yang diperoleh dari survey nasional oleh Pulse Asia Research per tanggal 25 September hingga 1 Oktober 2016 terkait kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Duterte (Michelle, 2016).

Dalam implementasi kebijakan *war on drugs* Duterte diketahui telah memberikan impunitas dan kewenangan terhadap PNP untuk membunuh terduga dan pecandu narkoba (HRW, 2017). Berdasarkan data dari Philippine Center For Investigative Journalism

(2017), dalam operasi yang dilakukan oleh PNP pada rentang bulan Juli 2016-May 2017, setidaknya telah membunuh 2,962 jiwa. Ketegasan Duterte justru berhasil membuat jera para tersangka narkoba. Pada bulan September 2016, kurang lebih sebanyak 687.000 tersangka narkoba menyerahkan diri ke penjara karena takut menjadi korban pembunuhan dari kebijakan *war on drugs* (Paddock, 2016). Lebih lanjut, angka pengguna narkoba juga mengalami penurunan yang drastis yakni lebih dari 50%, yang mana dari 4 juta pada tahun 2016 menjadi 1,67 juta pada tahun 2019 (Xinhua, 2020).

Kendati demikian, kebijakan ini juga mendapat penentangan dari pihak oposisi maupun masyarakat internasional, seperti yang dilakukan oleh legislator oposisi Filipina yaitu anggota majelis rendah Dewan Perwakilan Filipina, dan organisasi internasional seperti Amnesty International, HRW, dan PBB yang mendesak Duterte untuk menghentikan kebijakannya karena dianggap telah melanggar HAM. Adapun beberapa nilai HAM yang dilanggar Duterte yaitu Pasal 3 UDHR yang menyatakan sebagai seorang individu maka seseorang atau setiap individu memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk kebebasannya dan memiliki hak untuk keselamatannya. Melanggar Pasal 11 Ayat 1 UDHR menyatakan seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan tidak dapat dikatakan bersalah sampai dapat dibuktikan tindak pidana yang dilakukannya (Rosiyana & Sukranatha, 2019).

Meskipun terdapat tuduhan atas pelanggaran HAM dan tekanan pihak oposisi dan masyarakat internasional atas kebijakannya, namun Duterte tidak memperdulikannya. Duterte bahkan tetap bersikeras dan berjanji akan terus melanjutkan kebijakan ini hingga akhir kepemimpinannya (BBC, 2017). Mengacu pada permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melihat alasan Duterte mengeluarkan kebijakan *war on drugs* yang telah mengabaikan tekanan pihak oposisi maupun internasional melalui model analisis teori idiosinkratik oleh Alex Mintz Karl DeRouen (2010).

Penulis menggunakan tiga literatur sebagai

acuan. Literatur pertama berjudul *‘Pengaruh Idiosinkratik Kim Jong Un Terhadap Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Studi Kasus Meningkatnya Eskalasi Konflik Di Semenanjung Korea (2013)’* oleh Reesty Dyahwatie Siswoyo (2015). Dalam penelitian Siswoyo (2015) menjelaskan bahwa sutau kebijakan yang dicetuskan oleh seorang pemimpin negara juga dipengaruhi oleh karakteristik melalui sifat dan gaya kepemimpinan yang dianutnya. Tulisan Siswoyo membantu penulis dalam memahami bagaimana karakteristik personal seorang pemimpin dapat memengaruhinya dalam mengambil suatu keputusan kebijakan.

Dalam penelitian Siswoyo memperlihatkan bahwa ambisi yang tinggi dari seorang pemimpin juga dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan hidup yang membentuk sikap dan gaya kepemimpinannya dalam membuat keputusan kebijakan. Namun, hasil penelitian Siswoyo hanya terbatas pada penjelasan gaya kepemimpinannya. Sedangkan penelitian ini akan lebih lanjut membahas terkait unsur kepribadian hingga tipe pemimpin yang berpengaruh pada kebijakan yang dibuatnya.

Literatur kedua yang membantu penelitian ini yaitu tulisan yang berjudul *Perang Terhadap Narkoba ala Duterte (Analisis Political Culture)* oleh Fadlia, F. & Ramadani, I (2018). Tulisan ini menjelaskan bahwa Filipina tengah dihadapkan pada kondisi kriminalitas yang tinggi, sehingga masyarakatnya lebih membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menegakkan kebebasan dari rasa takut. Sosok Duterte memiliki gaya kepemimpinan yang berani dan apa adanya. Hukum tidak akan memerintahkan presiden untuk melindungi para pejabat, merupakan komitmen yang dibawa oleh Duterte dalam mengimplementasikan kebijakan *war on drugs*. Tidak hanya menasar masyarakat, namun terbukti sebanyak 11 Walikota dan Wakil Walikota terbunuh karena diduga terlibat narkoba. Hal tersebut pada akhirnya membuat masyarakat semakin percaya kepada sosok Duterte dan kebijakannya yang terkesan tidak tumpang tindih. Namun, tulisan ini menjelaskan bahwa kebijakan ini cenderung mengarah kepada kebijakan *short term* dimana

kebijakan ini lebih lanjut juga akan dapat menciptakan budaya kekerasan di masyarakat.

Tulisan Fadlia & Ramadani ini membantu penulis dalam melihat bagaimana gaya kepemimpinan Duterte dalam menjalankan kebijakan *war on drugs* dan memahami bagaimana masyarakat Filipina sangat mendukung kebijakannya meskipun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran HAM. Namun tulisan ini tidak menjelaskan terkait pengaruh kepribadian pemimpin Duterte yang dapat menjelaskan alasannya untuk mengeluarkan kebijakan *war on drugs*.

Literatur ketiga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tulisan dengan judul *Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina* karya Saragih, H.M & Anisa Prayuningsih (2021). Tulisan ini menjelaskan bahwa pembunuhan yang terjadi pada kebijakan *war on drugs* dipandang sebagai pembunuhan dalam skala yang besar yang disetujui oleh negara. Sebagian besar masyarakat kelas bawah tidak menyetujui kebijakan ini karena khawatir seseorang kerabatnya akan menjadi korban pembunuhan. Namun masyarakat kelas atas menaruh kepercayaan besar kepada Duterte.

Dengan bukti bahwa terdapat penurunan drastis angka kriminalitas di Filipina dan adanya dukungan masyarakat, kemudian menyebabkan Duterte mengenyampingkan masalah HAM. Tulisan ini dapat membantu penulis untuk melihat analisis struktural dimana sebuah fenomena kebijakan yang keras dan kejam kemudian mendapatkan banyak dukungan masyarakat. Hal tersebut tentu tidak lepas dari pengaruh sosok pribadi Duterte yang dapat memenangkan hati masyarakat Filipina atas kebijakannya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih detail terkait faktor-faktor kepribadian yang memengaruhi Duterte dalam mengeluarkan kebijakan yang menjadi janji kampanyenya

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif, dengan sumber data secara sekunder melalui studi kepustakaan.

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu individu dengan melihat bagaimana faktor idiosinkratik Presiden Rodrigo Roa Duterte berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam kebijakannya. Lebih lanjut, terdapat tiga tahap yang digunakan dalam teknik analisis data yaitu; Pertama, reduksi data. Kedua, *display* atau penyajian data. Ketiga, kesimpulan dan verifikasi data. Data-data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk teks narasi yang diurutkan serta didukung oleh adanya penambahan gambar, tabel ataupun grafik yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan disetiap bab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pribadi Rodrigo Roa Duterte

'*A child of privilege*' merupakan sebutan yang ditujukan untuk Rodrigo Roa Duterte (Paddock, 2017). Duterte lahir tanggal 28 Maret 1945 dan besar dalam keluarga yang aktif secara politik, dimana ibunya Soleded Roa merupakan seorang guru dan pemimpin sipil, sedangkan ayahnya Vicente Duterte berasal dari Cabadbaran, Agusan, merupakan seorang pengacara Cebuano dan terpilih menjadi seorang Walikota di Danao, Cebu. Logika berfikir Rodrigo Duterte terhadap politik telah terbentuk sejak dia kecil melalui lingkungan keluarganya. Pamannya Ramon Duterte dan sepupunya Roland juga merupakan seorang politisi yang memegang jabatan penting di negara tersebut. Kekuatan politik keluarga Duterte juga didukung oleh adanya relasi kekeluargaan dengan klan Visayan serta mempunyai ikatan kekerabatan dengan klan Durano dan Almendras.

Sikap dan perilaku Rodrigo Duterte kian dipengaruhi oleh pengalaman masa remajanya yang bergaul bersama dengan orang-orang kota yang tangguh, keras, kuat, sering berkelahi dan *street-smart*, sehingga dia secara tidak langsung mempelajari ekspresi, kosa kata dan tingkah laku mereka. Rodrigo Duterte memulai karir politik sebagai Wakil Walikota Davao yang

saat itu dipimpin oleh Jacinto T. Rubillar tepatnya sejak 2 Mei 1986 hingga 27 November 1987 dan melanjutkan tampuk kekuasaan sebagai Walikota Davao selama 7 periode masa jabatan (Setiawan, 2016). Rodrigo Duterte menikah dengan Elizabeth Abellana Zimmerman dan dikaruniai tiga orang anak yakni Paolo Duterte, Sara Duterte dan Sebastian Duterte. Adapun Paolo dan Sara mengikuti jejak ayahnya terjun ke dunia politik.

Setelah menikmati 7 periode sebagai Walikota Kota Davao, di usianya yang ke-71 tahun Duterte menyatakan bahwa dirinya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina 2016 pada 21 November 2015. Dalam kampanye yang dijanjikan, Rodrigo hadir dengan janji untuk memberantas kriminalitas narkoba melalui kebijakan *war on drugs*. Hal tersebut membuatnya memenangkan pemilihan Presiden dengan mengantongi suara sebanyak 14,9 Juta suara dari 90% suara yang telah dihitung (CNN Indonesia, 2016).

Kebijakan *War on Drugs*

Pasca kemenangannya, Duterte menyatakan bahwa dia hanya membutuhkan waktu sedikitnya tiga (3) hingga enam (6) bulan untuk memberantas narkoba, dan memberikan jaminan bahwa dalam enam (6) bulan pertama dia akan memberikan hasil dalam upayanya memerangi narkoba (Adiyanto, 2016). Duterte juga akan mengadopsi cara yang sama yang pernah dilakukannya di Kota Davao saat menjadi Walikota, dengan menyatakan: '*when I first said I will fight drugs in six months, I thought it was like in Davao*' – Rodrigo Duterte'.

Berdasarkan data dari Philippine News Agency (2019), terhitung dari tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 November 2019, kebijakan *war on drugs* yang menjadi agenda utama Presiden Rodrigo Duterte membuahkan hasil dari penyitaan obat-obat terlarang yang bernilai sekitar PHP40,39 miliar. Pada tanggal 12 Desember 2019, pemerintah Filipina merilis data terbaru dimana sebanyak 151.601 operasi

anti-narkoba yang secara sah dilakukan sejak Duterte menjabat hingga 30 November 2019, telah menyebabkan penangkapan 220.728 tersangka narkoba yang mana 726 dari 220.728 orang yang ditangkap merupakan pegawai pemerintah yang secara khusus 82 orang merupakan pegawai berseragam, 297 orang merupakan pejabat terpilih, dan 347 orang merupakan pegawai negeri. Selain itu, operasi yang dilakukan dalam kebijakan ini juga turut menyebabkan kematian 5.552 tersangka narkoba (PNA, 2019). Adapun beberapa operasi yang dilakukan dalam kebijakan *war on drugs* yaitu diantaranya:

a. PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: "Double Barrel"

Atas perintah dari Presiden Rodrigo Duterte yang disampaikan melalui *Command Memorandum Circular* No. 16 Tahun 2016 tentang *PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: 'Double Barrel'* yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2016. Operasi ini dibentuk sebagai upaya dukungan pemerintah kepada *Barangay Drug Clearing Strategy* dan netralisasi narkoba secara nasional serta membawa misi untuk membersihkan semua barangay yang terdampak narkoba, melakukan operasi kepada para oknum narkoba serta membongkar sindikat narkoba di Filipina (PNP, 2016). Operasi ini dilakukan melalui pendekatan dua arah yakni Project Tokhang dan HVT.

• **Project Tokhang (ToktokHangyo)**

Project Tokhang termasuk dalam kategori *The Lower Barrel*. Dalam hal ini, Oplan Tokhang dilakukan oleh PNP dengan cara mengunjungi setiap rumah orang-orang yang diduga terlibat narkoba dengan maksud meminta mereka untuk menghentikan aktivitas narkoba dan/atau menyerahkan diri untuk

mendapatkan rehabilitasi. Namun, Duterte menyerukan PNP apabila saat operasi terduga narkoba melakukan

perlawanan dan tindakan yang membahayakan, maka PNP diperintahkan untuk menembak mati mereka ditempat.

• **Project HVT (High Value Target)**

Project HVT termasuk ke dalam kategori *The Upper Barrel*. *Project HVT* merupakan operasi yang dilakukan dengan cara penggerebekan, melalui layanan surat perintah untuk pengeledahan dan penangkapan, perburuan dan pemeriksaan terhadap *High Value and Street Level Targets* yang terlibat dalam aktivitas narkoba (DDB, 2018). *Project* ini dilakukan dalam skala yang lebih luas yakni nasional, regional, kabupaten, provinsi dan kota. Sehingga *project* ini dilakukan oleh tim profesional dan berkompeten, seperti tim fokus dari AIDG, PRO, NCRPO, PPO, dan CPO.

b. PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: "Double Barrel Alpha"

Pada tanggal 26 Oktober 2016, dibawah naungan Presiden Rodrigo Duterte, PNP mengubah strategi pelaksanaan operasi anti narkoba dengan memperluas cakupan *Project Double Barrel* yang asli dengan meluncurkan *Project 'Double Barrel Alpha'*. Adapun *project* ini memfokuskan pada penangkapan *high-value targets* dalam kasus perdagangan narkoba secara ilegal (CNN Philippines, 2017). Surki Sereñas selaku juru bicara PRO, menyatakan bahwa *project* ini akan memperkuat fokusnya dalam upaya menangkap para tokoh penting atau petinggi negara, baik yang bekerja dalam lingkungan pemerintahan, militer, polisi, dan industri bisnis yang turut terlibat dalam aktivitas narkoba ilegal (Joy, 2016).

c. The Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD)

ICAD dibentuk berdasarkan perintah Rodrigo Roa Duterte selaku Presiden Filipina melalui *Executive Order* No.15

Tahun 2017 mengenai *Creation of an Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD) and Anti-Illegal Drugs Task Force to Suppress the Drugs Problem in The Country*. ICAD terdiri atas empat (4) klaster yang memiliki peran masing-masing dalam memerangi narkoba, yaitu *enforcement cluster*, *justice cluster*, *advocacy cluster*, serta *rehabilitation and reintegration cluster*. ICAD dipimpin oleh PDEA yang akan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa tujuan serta klaster yang telah dibentuk dalam ICAD dapat tercapai dan terlaksana secara keseluruhan.

Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan War on Drugs di Filipina

• Pelanggaran HAM

Konstitusi dengan jelas menjelaskan bahwa negara *"values the dignity of every human person and guarantees full respect of human rights"*. Namun, retorika Duterte dalam lima tahun terakhir terlihat tidak hanya telah mengabaikan HAM sebagai elemen kunci dalam kemajuan bangsa, namun juga mengabaikan HAM sebagai mandate yang tertuang dalam hukum tertinggi negara (Kurt Dela Peña, 2021). Pembunuhan yang terjadi dalam kebijakan *war on drugs* dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena telah memenuhi beberapa elemen di Statuta Roma 1998 seperti pada Pasal 7 Statuta Roma 1998 yakni aparat negara yang melakukan pembunuhan secara sistematis dan meluas (Leksono & Fivi, 2018).

• Reaksi Internasional

Beragam reaksi masyarakat atau komunitas internasional yang ditunjukkan untuk Duterte atas pendekatan keras yang dilakukan dalam kebijakannya. HRW laporannya seperti *'License to Kill, Philippine Police Killings in Duterte's War on Drugs'* yang diterbitkan pada Maret 2017, didalamnya menyatakan bahwa atas dukungan luar biasa

yang diberikan Duterte atas kebijakan tersebut, terlihat bahwa ada kemungkinan Duterte serta pejabat lainnya di Filipina telah melakukan kemungkinan hasutan untuk melakukan kekerasan, hasutan pembunuhan, dan bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan (HRW, 2017).

Lebih lanjut, pada tanggal 27 Mei 2020, HRW juga mengeluarkan laporan bahwa anak-anak juga turut menjadi korban dari kebijakan ini. PBB juga secara aktif memberikan kritiknya kepada Duterte, namun Duterte memberikan ancaman akan keluar dari organisasi internasional ini jika PBB terus ikut campur (BBC, 2016). ICC juga turut memberikan tanggapannya untuk meminta melakukan penyidikan di Filipina. Namun pada tanggal 17 Maret 2019, Duterte memberikan keputusan bahwa negaranya menarik diri keluar dari ICC.

Analisis Idiosinkratik Rodrigo Roa Duterte Atas Kebijakan War on Drugs

Melalui faktor-faktor psikologis dalam membuat kebijakan yang dijelaskan oleh Mintz & DeRouen (2010:97-119), yaitu; konsistensi kognitif, kepribadian pemimpin, gaya kepemimpinan dan tipe pemimpin, penulis akan menganalisis idiosinkratik Presiden Rodrigo Roa Duterte yang memengaruhinya dalam membuat kebijakan *war on drugs*.

Konsistensi Kognitif Rodrigo Roa Duterte

Adapun konsistensi kognitif menjadi suatu acuan bagi seorang pemimpin dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada citra dan kepercayaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Citra

Citra merupakan suatu stereotip yang digunakan oleh pikiran guna mengkategorikan orang ataupun peristiwa melalui proses kognitif (Herrmann et al. 1997, 407-408). Sejalan dengan itu, proses kognitif secara khusus dipengaruhi oleh faktor pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Selama periode tahun 1986-2016 dimana Rodrigo

Duterte memulai karir politiknya, melalui pembawaan sosok yang didukung oleh karakternya dia berhasil membangun stereotip dirinya sebagai pribadi yang memiliki tanggung jawab. Kinerjanya yang baik dan dikenal dekat dengan kalangan masyarakat, kemudian membuatnya disenangi oleh masyarakat serta berhasil memimpin Kota Davao selama 22 tahun. Duterte membawa citra *killer-savior*, yang mana di satu sisi, Duterte sering kali membanggakan aksi pembunuhan terhadap para kriminal yang dilakukannya. Pada tahun 2016 setelah menjadi presiden, Duterte memberikan dorongan kepada PNP dan masyarakat Filipina untuk membunuh ribuan orang yang terkait narkoba dengan memberikan mereka impunitas. Ketegasannya dalam memerangi kejahatan narkoba secara khusus membuatnya dilabeli sebagai *'The Punisher'* oleh rakyat Filipina. Mayoritas masyarakat Filipina yang mengalami penderitaan terhadap kejahatan kriminalitas dan kekerasan yang tinggi khususnya kejahatan narkoba, melihat bahwa pendekatan secara *gangland* yang dilakukan dalam memerangi kriminalitas dan narkoba oleh Duterte, merupakan suatu bentuk perubahan yang baru dari elit yang sebelumnya telah memerintah negara ini dalam tiga dekade terakhir (Paddock, 2017).

b. Kepercayaan

Rehson dalam Mintz (2010:101) menjelaskan bahwa dalam membuat suatu keputusan, keyakinan atau kepercayaan menjadi suatu acuan seseorang dalam memahami serta menjelaskan situasi. Citra yang melekat pada Duterte secara tidak langsung akan membentuk kepercayaan masyarakat umum kepadanya. Apabila dilihat dari bagaimana Duterte berusaha berdiri sebagai sosok yang ingin mewakili suara masyarakat yang geram dengan angka kriminalitas tinggi di Filipina, dengan melakukan usaha dalam membuat suatu perubahan dan perlindungan bagi

generasi muda di negaranya dari pengaruh narkoba melalui kebijakan *war on drugs* ini, maka Rodrigo Duterte diyakini menganut paham populisme. Dukungan dari masyarakat sangatlah penting, sehingga melalui kebijakan yang populis maka akan dapat merespon masalah dan menarik simpati masyarakat, dalam artian pemimpin populis berfokus untuk memperkokoh kepentingan dan hubungan dengan rakyatnya. Gaya politik pemimpin populis juga memiliki ciri-ciri anti kemapanan dan anti elit seperti yang dijelaskan oleh Stoke, et al. (2014). Hal tersebut sama seperti apa yang dilakukan oleh Duterte dalam kebijakan *war on drugs* nya, dimana Duterte lebih berpihak kepada sebagian besar rakyatnya dengan terus menunjukkan ke-antianya terhadap para organisasi internasional yang ingin menghentikan kebijakan yang dibuatnya. Pada akhirnya, tujuan yang diinginkan oleh para pemimpin populis termasuk Duterte adalah untuk memperoleh legitimasi politik dimata masyarakat dan kekuatan politik lainnya sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan kekuasaannya hingga membuatnya dapat tetap berkuasa atas kebijakan *war on drugs* yang dikenal kontroversial.

Kepribadian Pemimpin Rodrigo Roa Duterte

Kepribadian didefinisikan oleh Mintz sebagai suatu pembauran yang tertata secara individual melalui proses pemahaman, ingatan, penilaian, pencarian tujuan, ekspresi serta emosional. Terdapat empat (4) hal utama yang ada dalam kepribadian pemimpin dan untuk menganalisis kepribadian Rodrigo Roa Duterte, yaitu temperamen, kognisi, motif dan konteks sosial, peneliti akan menganalisis elemen-elemen tersebut sebagai berikut:

a. Temperamen

McDermott dalam Mintz (2010:99) menjelaskan bahwa emosi dibangun atas pengalaman, perasaan fisik, pemikiran, dan motivasi. Apabila dalam mengambil keputusan diikuti oleh emosi yang berlebihan seperti melalui kemarahan yang berlebih, maka akan sulit dalam

memperoleh ketepatan dalam pengambilan keputusan. Duterte memberikan pengakuan bahwa dia memang seorang yang temperamen. Emmanuel Duterte dalam *The New York Times* (2017) menyatakan bahwa saat kecil hingga remaja kekerasan yang diperoleh di rumah, sekolah hingga lingkungan sekitarnya membuat pribadi Duterte menjadi sosok yang mudah marah. Rasa sakit yang dirasakannya saat muda dulu, membuat emosinya tak terkendali sepanjang waktu. Pengalaman buruk tersebut pada akhirnya membentuk karakter Duterte serta memengaruhi sikap politiknya dan bagaimana caranya untuk memandang dunia (Andrianjara & Lazuardhi, 2016). Dalam kebijakan ini beberapa emosi Duterte diperlihatkan melalui pernyataannya,

"Human rights, you are preoccupied with the lives of the criminals and drugs pusher. As the mayor and as president, I have to protect every man, woman, and child from the dangers of drugs. The game is killing. I say to the human rights, I don't give a shit with you. My order is still the same. Because I am angry" – Rodrigo Duterte."

b. Kognisi

Menurut KBBI, kognisi merupakan suatu proses atau kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang berdasarkan atas pengalaman sendiri. Dalam Mintz, kognisi terdiri atas beberapa elemen utama yakni keyakinan, nilai dan sikap. Adapun kepercayaan dalam hal ini merujuk pada sesuatu yang dipercaya atau diyakini oleh seseorang. Duterte memiliki keyakinan bahwa negara Filipina kini tengah dalam keadaan darurat narkoba dengan menyatakan bahwa terdapat lebih dari 4 juta pecandu narkoba di Filipina. Maraknya kasus narkoba, tentu akan berpotensi untuk mengancam keamanan nasional Filipina secara khusus keamanan dari rakyatnya. Duterte yakin bahwa kunci dari adanya ketertiban dan perdamaian yaitu dengan bersikap keras kepada para kriminal

(Inquirer, 2015). Sikap tersebut kemudian juga sejalan dengan nilai yang diterapkan oleh Duterte. Dalam menjalankan kebijakan ini, Duterte berkali-kali menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan nilai HAM. Duterte berasumsi bahwa jika negara bersikap lembut dan membiarkan segala sesuatu ditinjau berdasarkan nilai HAM khususnya dalam menumpas kejahatan, maka masalah lainnya akan muncul. Logika sederhananya, jika dilakukan dengan cara yang lebih halus dan lembut, maka hal tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku kriminal, dan justru akan membuat para kriminal lebih berani dan kembali melakukan kejahatan serupa.

c. Motif

Motif didalamnya mencakup tujuan dan mekanisme strategi atau pertahanan. Seperti apa yang telah dijelaskan pada sub bab 4.1.1 diketahui bahwa sedari kecil Duterte telah memiliki naluri politik, sehingga ia memiliki ambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika kini ia telah mendapatkan tampuk tertinggi kekuasaan pemerintahan Filipina, maka ia memiliki tugas dan tanggung jawab atas keberlangsungan hidup dan keamanan rakyatnya. Melalui kebijakan *war on drugs*, Duterte memiliki ambisi untuk dapat menghentikan kriminalitas narkoba sebagai strateginya untuk mendapat perhatian dan simpati dari masyarakat serta menjadikan Filipina sebagai negara yang lebih aman.

d. Konteks Sosial

Konteks sosial didalamnya mencakup faktor yang dapat diamati dengan jelas seperti halnya generasi, jenis kelamin, ras, budaya, dan kelas. Rodrigo Duterte dijuluki *'a child of privilege'*, yaitu seorang anak laki-laki istimewa yang merupakan anak dari seorang Gubernur. Menjadi seorang anak Gubernur tentu membuat Duterte memiliki posisi kelas diatas rata-rata masyarakat pada umumnya. Dengan melihat fakta bahwa keluarganya yang sebagian besar

berkecimpung dipanggung politik dan memiliki relasi dengan klan-klan yang berpengaruh di Filipina seperti klan Visayan, klan Durano dan Almendras sebagai keluarga politik membuatnya memiliki kekuatan politik yang besar. Lebih-lebih kini Duterte menjadi seorang pemimpin negara, menjadikan kekuasaan dan kekuatannya jauh lebih besar dan kuat dalam bidang politik.

Gaya Kepemimpinan Rodrigo Roa Duterte

Alex Mintz dalam bukunya membagi jenis gaya kepemimpinan menjadi dua, yaitu *context oriented* dan *task oriented*. Gaya kepemimpinan *context oriented* cenderung dimiliki oleh seorang pemimpin yang lebih berhati-hati, menghindari resiko dan mudah beradaptasi sesuai dengan konteks situasi yang dihadapi dan cenderung lebih suka untuk berkonsultasi, berdiskusi, serta terbuka dalam mencari solusi. Sedangkan gaya kepemimpinan *task oriented* memiliki kecenderungan untuk tidak memerlukan atau bahkan menolak koalisi dari pihak internal atau domestik maupun eksternal atau internasional dan mengambil langkah yang lebih kuat dan beresiko. Mengingat *task oriented* memiliki kecenderungan untuk tidak berkonsultasi dan berkompromi dan menantang kendala politik, memiliki tingkat kepekaan yang tidak terlalu sensitif terhadap konteks politik, sehingga pemimpin yang mengadopsi gaya kepemimpinan ini akan berpeluang besar dalam memimpin sebuah negara ke dalam konflik bersenjata.

Adapun melalui analisis dua elemen utama yang dilakukan sebelumnya, yakni melalui konsistensi kognitif dan kepribadian pemimpin, peneliti lebih lanjut menemukan bahwa faktor-faktor yang terdapat pada pribadinya, yang sangat berpegang teguh pada pendirian, menentang batasan-batasan politik, menolak informasi, serta berfokus pada masalah. Dengan itu maka Rodrigo Duterte cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan *task oriented*.

Menentang batasan-batasan politik dalam hal ini merujuk pada bagaimana sosok seorang Duterte yang menentang para tokoh oposisi, pihak mitra/relasi Filipina,

dan organisasi internasional yang mengkritik atau bahkan menolak keras kebijakan *war on drugs* ini. Pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Duterte menunjukkan sikap yang menolak permintaan PBB untuk melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan dalam kebijakan yang dibuat olehnya, dan pada akhirnya akibat kritikan pedas yang dilayangkan PBB atas *war on drugs*, dengan amarahnya Duterte kemudian memberikan ancaman bahwa negaranya akan keluar dari keanggotaan PBB (CNN Indonesia, 2016). Duterte juga berjanji untuk tidak akan tunduk pada tekanan yang diberikan oleh berbagai pihak internasional.

Tekanan lain juga datang dari pihak oposisi Duterte, Leni Robredo selaku Wapres yang secara aktif memberikan kritiknya terhadap kebijakan *war on drugs* yang mana kebijakan ini dianggap belum dapat memberantas narkoba, dan dalam gerakan pemberantasan narkoba tersebut, terselip banyaknya tindakan pelanggaran terhadap HAM. Kritikan tersebut membuat marah Duterte dan menantang Leni apakah ia sanggup untuk dapat mengendalikan narkoba di Filipina dan siap memberikan kekuasaan yang dimilikinya kepada Wapresnya (Antara News, 2019).

Lebih lanjut, pemimpin yang mengadopsi gaya kepemimpinan *task oriented* memiliki kecenderungan untuk sulit menerima atau menolak informasi karena ia berpegang teguh pada pendirian dan sulit mengubah keyakinannya. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah informasi yang berasal dari opini publik maupun media massa. Informasi berupa pendapat atau pun kritikan yang dikemas melalui portal berita di media yang dianggap bertentangan dengan kepercayaan yang diyakini akan ditolak dan dimusuhi.

Hal tersebut terjadi kepada Rappler sebagai media Filipina yang secara aktif menuliskan artikel berita yang mengkritik dan mengulas tindakan penembakan mati para tersangka hingga terduga narkoba dalam kebijakan *war on drugs*. Pada tahun 2018 lalu, Duterte mulai mengecam Rappler sebagai media "penyebarkan berita bohong" dan memberikan larangan kepada wartawan maupun pemimpin

redaksi dari Rappler untuk meliput acara kepresidenan. Terlebih pada tanggal 15 Juni 2020, Maria Ressa selaku pimpinan redaksi Rappler divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik (Tempo.co, 2020). Duterte memilih untuk mengabaikan tanggapan orang-orang tentang dirinya dan kebijakannya, karena ia sebagai pencetus kebijakan *war on drugs* percaya bahwa ia memiliki tugas untuk melindungi generasi selanjutnya dari pengaruh narkoba.

Tipe Pemimpin Rodrigo Roa Duterte

Tipe pemimpin digunakan sebagai indikator yang dapat memperkuat analisis pada gaya kepemimpinan Duterte serta kemudian dapat menguatkan jawaban mengapa Presiden Rodrigo Roa Duterte mencetuskan kebijakan *war on drugs*. Mintz & DeRouen (2010) mengutip Margaret Hermann (2001:91) yang membagi tipe pemimpin menjadi empat kategori, yakni *crusader* yang dibagi menjadi *expansionist* dan *evangelist*. Tipe *strategic* dibagi menjadi *incremental* dan *charismatic*. Tipe *pragmatic* dibagi menjadi *directive* dan *consultative*. Tipe *opportunistic* yang dibagi menjadi *reactive* dan *accommodative*.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Duterte termasuk ke dalam tipe pemimpin yang *pragmatic*, dengan bukti bahwa ia cukup menentang batasan-batasan politik, dan menentang informasi-informasi yang dipercaya tidak sesuai dengan citra serta keyakinannya. *Pragmatic* atau pragmatis menurut KBBI berarti suatu sifat yang menjunjung nilai kepraktisan dan manfaat atau kegunaan. Seorang pemimpin yang memiliki sifat pragmatis memiliki kecenderungan untuk berfikir yang instan, praktis dan sempit karena umumnya sifat ini dimiliki oleh pemimpin yang memiliki ambisi yang sangat tinggi, khususnya bagi pemimpin yang menginginkan suatu permasalahan dapat diselesaikan dalam waktu atau dengan proses yang singkat dan cepat memberikan hasil.

Mengacu pada penjelasan diatas, jika disesuaikan dengan analisis-analisis yang telah dilakukan atas kepribadian Rodrigo

Duterte dalam mencetuskan kebijakan *war on drugs*, kemudian memperlihatkan bahwa Duterte merupakan seorang pemimpin yang menggunakan pendekatan pragmatis. Berdasarkan atas pernyataan Duterte dalam kampanye kepresidenannya yang menyatakan bahwa ia hanya akan membutuhkan waktu setidaknya tiga (3) hingga enam (6) bulan untuk memberantas narkoba, serta menjamin dalam enam (6) bulan pertama ia akan memberikan hasil dalam upayanya memerangi narkoba di Filipina. Diketahui bahwa Duterte menyatakan bahwa terdapat 4 juta pengguna narkoba di Filipina, sedangkan ia ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu yang terbilang singkat yaitu 3-6 bulan. Logika berpikirmya adalah jika dilakukan dengan cara biasa, tentu masalah narkoba tidak akan bisa diselesaikan dengan cepat sehingga diimplementasikan dengan cara yang lebih instan dan praktis khususnya menembak mati para tersangka maupun pengedar narkoba untuk dapat menyelesaikan narkoba dengan cepat, sehingga cara tersebut kemudian dapat membantu Duterte untuk merealisasikan janji yang dulu ia sampaikan saat kampanye.

Tysara (2021) dalam tulisannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa macam sifat yang dimiliki seorang yang menganut sifat pragmatis, yaitu menggebu-gebu dalam menggapai sesuatu, menghalalkan segala cara dan suka membanding-bandingkan. Ambisinya yang tinggi membuatnya menjadi sosok pemimpin yang begitu menggebu-gebu dalam menyelesaikan permasalahan narkoba di Filipina, hal tersebut lebih lanjut membuat Duterte berupaya untuk menggunakan dan membenarkan segala cara dalam mengimplementasikan kebijakan *war on drugs*, yakni dengan menggunakan pendekatan yang keras dan kejam. Namun ia cenderung membenarkan hal tersebut dan tidak memperdulikan masalah HAM yang dilanggar.

Mintz yang mengutip Margaret Hermann (2001:91) menjelaskan bahwa seorang yang *pragmatic directive* memiliki kecenderungan dimana ketika dihadapkan pada tantangan politik, pemimpin akan terfokus pada masalah dengan tetap berlandaskan atas opini pribadi. Hal tersebut juga terlihat pada diri Duterte,

dimana ia merupakan seorang pemimpin yang dalam menentukan keputusannya, ia bergerak sesuai dengan apa yang diyakini atau benar dan bertindak atas opini pribadinya, sehingga Duterte termasuk ke dalam *pragmatic directive*.

Dalam upayanya mengatasi masalah narkoba, Duterte juga membandingkan dirinya dengan pemimpin kontroversial dunia, yakni Adolf Hitler. Dalam pidatonya, Duterte ingin membunuh jutaan pecandu narkoba, seperti halnya yang dilakukan oleh Hitler yang membunuh orang-orang Yahudi selama Holocaust. Duterte akan menghukum siapapun, baik anggota kepolisian, kongres, maupun para politisi, hingga organisasi internasional yang dirasa berupaya untuk menghalangi ambisinya. Hal tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan berkurangnya jumlah kriminal narkoba di Filipina.

Dengan demikian, kepribadian yang dimiliki oleh Duterte membuatnya yakin bahwa Filipina akan mampu menjadi negara yang aman, dan sekaligus dapat meyakinkan masyarakat terhadap kualitas dirinya. Dengan itu Duterte juga memperlihatkan bahwa ia pemimpin yang menggunakan pendekatan yang cenderung bergantung pada keberhasilan penerapan pendekatan praktisnya.

PENUTUP

Kebijakan *War on Drugs* yang dicetuskan oleh Presiden Rodrigo Roa Duterte untuk melindungi keamanan negara dari pengaruh narkoba. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari pihak domestik maupun internasional karena dinilai telah menyimpang dari konstitusi yang memerintahkan untuk menghargai harkat dan martabat setiap manusia dan menjamin penghormatan penuh terhadap nilai HAM. Namun retorika Duterte memperlihatkan bagaimana HAM yang sejatinya menjadi elemen kunci kemajuan bangsa dan negara yang sekaligus sebagai mandate dari hukum tertinggi negara menjadi sesuatu nilai yang diabaikan, seperti pengabaian atas hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas keselamatan dan sebagainya.

Berdasarkan atas analisis yang

dilakukan peneliti melalui faktor psikologis (idiosinkratik) yang memuat analisis konsistensi kognitif, kepribadian pemimpin, gaya kepemimpinan serta tipe pemimpinnya, alasan Rodrigo Roa Duterte membuat kebijakan *war on drugs* adalah latar belakang Duterte sebagai anak seorang Gubernur dan keluarga yang erat dengan politik, ditambah hubungan keluarganya dengan klan besar di Filipina menjadikannya berpeluang besar menjadi pemimpin yang berpengaruh di Filipina.

Kepercayaan dan keyakinan Duterte bahwa cara yang lebih keras akan jauh lebih efektif untuk membuat jera para pelaku kriminal narkoba, sehingga membuatnya sering kali mengabaikan nilai-nilai HAM. Tekad Duterte yang direpresentasikan melalui janjinya untuk memberantas narkoba, membuatnya berfokus pada tugas untuk dapat menyelesaikan permasalahan narkoba dalam jangka waktu yang tehitung cepat yakni 3-6 bulan pasca kepemimpinannya dan dengan cara yang terbilang praktis yakni membunuh (menembak mati) para kriminal narkoba, kemudian membuatnya termasuk ke dalam kategori pemimpin yang mengadopsi gaya kepemimpinan dan tipe pemimpin yang *Task Oriented* dan *Pragmatic Directive*. Adapun gaya kepemimpinan tersebut dimiliki oleh seorang pemimpin yang memiliki kecenderungan untuk menentang batasan politik seperti organisasi internasional yang menjadi mitra/relasi negaranya, pihak/tokoh oposisi serta cenderung menolak informasi baru seperti informasi yang berasal dari media ataupun opini publik yang tidak sesuai dengan kepercayaan dan citranya.

Daftar Pustaka

Buku:

Mintz, A. & Karl DeRouen. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal:

Fadlia, F, & Ramadani, I. (2018). *Perang Terhadap Narkoba ala Duterte (Analisis Political Culture)*. *Journal of International Relations*. Universitas Syiah Kuala.

Rosviyana & Sukranatha. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengedar Narkoba di*

Filipina Ditinjau Dari Perspektif HAM Internasional. Universitas Udayana.

- Saragih, H. M & Anisa Prayuningsih. (2021). *Kebijakan War on Drug Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 6, No. 2. Universitas Nasional.
- Siswoyo, Reesty Dyahwatie. 2015. *Pengaruh Idiosinkratik Kim Jong Un Terhadap Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Studi Kasus Meningkatnya Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea* (2013). *Jurnal Global & Policy*. Vol.3, No.1. UPN "Veteran".

Situs Resmi:

- PDEA. (2017). *EO_No.15series2017*. Diakses melalui https://pdea.gov.ph/images/Laws/EO_No.15_series2017.pdf, pada tanggal 23 Maret 2022.
- DDB. (2019). *2019 Drug Survey Shows Drug Use Prevalence Rate Falls to 2.05%*. Diakses melalui <https://www.ddb.gov.ph/newsroom/511-2019-drug-survey-shows-drug-use-prevalence-rate-falls-to-2-05>, pada tanggal 2 Januari 2022.
- PCIJ. (2017). *PCIJ Findings: What's Flawed, Fuzzy With Drug War Numbers?*. Diakses melalui <https://pcij.org/article/833/pcij-findings-whats-flawed-brfuzzy-with-drug-war-numbers>, pada tanggal 19 November 2021.
- PNA. (2019). *Duterte's Relentless War on Drugs, Corruption, Crime*. Diakses melalui <https://www.pna.gov.ph/articles/1089333>, pada tanggal 20 Maret 2022.
- Human Rights Watch. (2016). *Philippines' War on Drugs*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/tag/philippines-war-drugs>, pada tanggal 22 September 2021.

Media Daring:

- BBC. (24/7/2017). *Soal Narkoba, Presiden Duterte Berjanji Tak Akan Tunduk Pada Tekanan Internasional*. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40704806>, pada tanggal 20 November 2021.
- CNN Philippines. (6/12/2017). *PNP To Resume Anti- Drug Operations*. Diakses melalui <https://www.cnnphilippines.com/news/2017/12/06/PNP-resume-tokhang-double-barrel.html>, pada tanggal 22 Maret 2022.
- Kurt Dela Peña. (10/12/2021). *I Don't Care About Human Rights': Duterte and The Failure to See Human Rights' Role in*

Progress. Diakses melalui

<https://newsinfo.inquirer.net/1526313/i-dont-care-about-human-rights-duterte-and-the-failure-to-see-human-rights-role-in-progress>, pada tanggal 20 Maret 2022.

- Michelle, (2016). *Human Rights and Duterte's War on Drugs*. Diakses melalui <https://www.cfr.org/interview/human-right-s-and-dutertes-war-drugs>, pada tanggal 16 Oktober 2021.
- Richard C. Paddock. (2016). *In Philippine Drug War, Little Help for Those Who Surrender*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2016/09/06/world/asia/in-philippine-drug-war-little-help-for-those-who-surrender.html>, pada tanggal 20 Oktober 2021.
- Richard C. Paddock. (2017). *Becoming Duterte: The Making of a Philippine Strongman*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2017/03/21/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-president-strongman.html>, pada tanggal 20 Maret 2022.
- Setiawan, Agus. (10/5/2016). *Biografi Politisi Kontroversial Rodrigo Duterte*. Diakses melalui <https://nusantaranews.co/biografi-politisi-kontroversial-rodrigo-duterte/>, pada tanggal 15 Maret 2022.
- Tysara, Laudia. (13/10/2021). *Pragmatis adalah Kecenderungan Berfikir Cepat dan Instan, Pahami Lebih Jauh*. Diakses melalui <https://hot.liputan6.com/read/4682839/pragmatis-adalah-kecenderungan-berpikir-cepat-dan-instan-pahami-lebih-jauh#:~:text=Orang%20yang%20bersifat%20pragmatis%20adalah,melansir%20BUNGHATTA.ac.id.>, pada tanggal 2 April 2022.
- Xinhua. (20/10/2020). *Number of Illegal Drug Users in Philippines Declines by More Than 50 pct: Survey*. Diakses melalui http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/20/c_139454432.htm#:~:text=MANILA%2C%20Oct,use%2C%20a%20survey%20has%20shown, pada tanggal 2 Januari 2022